

## ABSTRAK

Patricia Widya Sari. *“Implikasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Bangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ”* (Dibimbing oleh Dr. Helvis, Ssos, SH, MH.)

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memangkas habis kewenangan kabupaten dalam bidang pertambangan khususnya penerbitan izin usaha pertambangan (IUP), begitu juga yang terjadi di Kabupaten Bangka dimana mata pencaharian masyarakat Bangka sebagian besar dibidang pertambangan. Setelah berlakunya UU Pemda 2014, dimana kabupaten tidak diberi wewennag lagi menerbitkan IUP lantas dengan diberlakunya UU Pemda ini apakah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif ditambahkan dengan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan Staff Litbang Bappeda Kabupaten Bangka. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan sedangkan data tersier diperoleh artikel di internet. Hasil penelitian: Berlakunya UU no. 23 Tahun 2014 tidak meberi kewenangan lagi kepada Kabupaten dalam bidang pertambangan khususnya dalam menerbitkan IUP, di Kabupaten Bangka sendiri setelah berlakunya UU Pemda memang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat Bangka karena memang sebagian besar mata pencaharian mereka dibidang pertambangan, selain itu tingkat perekonomian di Pulau Bangka juga mengalami penurunan di sektor pertambangan. Saran dalam penelitian ini adalah: Perlu adanya perubahan terbatas pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Pengelolaan sumber daya alam seharusnya dimasukkan menjadi urusan wajib pemerintah propinsi. Hal tersebut dimaksudkan agar pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah propinsi.

**Kata kunci:** Kewenangan, Kabupaten, Pertambangan

## ABSTRACT

Patricia Widya Sari. *“Provision of Mining Business Licenses in Bangka Regency Based on Act No. 23 Year 2014 on Regional Government ”*(Guided by Dr. Helvis, Ssos, SH, MH.)

The enactment of Act No. 23 Year 2014 About Local Government has cut off the authority of districts in the field of mining, especially the issuance of mining business permits (IUP), as well as in Bangka District where the livelihood of the people of Bangka mostly in the field of mining. After the enactment of the Regional Government Law 2014, where the district is not given another wewennag publish IUP then with the enactment of this Regional Government Law whether it affects the level of community welfare in Bangka regency. This type of research is normative juridical added with interviews. The data used are primary data, secondary data and tertiary data. Primary data is data obtained from research in the field by conducting interviews with Sir H. Harjono Staff of Bappeda of Bangka Regency. Secondary data is data obtained from the literature while tertiary data obtained articles on the internet. Result of the research: The enactment of Act No. 23 of 2014 does not give authority again to the Regency in the field of mining, especially in issuing IUP, in Bangka District itself after the enactment of the Regional Government Law does affect the level of prosperity of Bangka community because most of their livelihood in the field of mining, decreased in the mining sector. Suggestions in this study are: Need a limited change in Act No. 23 of 2014 on Regional Government with mandatory affairs and choice affairs in natural resource management. Natural resource management should be incorporated into mandatory provincial government affairs. It is intended that natural resource management becomes one of the priorities for the provincial government.

Keywords: Authority, Regency, Mining